

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada Badan Keuangan Daerah Bagian Akuntansi Dan Pelaporan Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait analisis penerapan sistem informasi pemerintah daerah dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah pada BKD Provinsi NTT belum berjalan dengan baik dapat disimpulkan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Sistem Informasi Pemda No 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Terdapat kelemahan dan keunggulan dimana pada SIPKD pemda memiliki backup database anggaran dan belanja daerah dan SIPD yaitu pemda tidak memiliki backup data karena dilihat dari server semua masih terpusat pada server mendagri. Sehingga pemda menerapkan kedua sistem tersebut dalam menerapkan regulasi Permendagri No 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Dari semua tahapan pengelolaan aplikasi SIPD dan SIPKD di pemerintah provinsi nusa tenggara timur dapat disimpulkan bahwa untuk tahap pengelolaan SIPKD masih terbilang baru tentunya membutuhkan penyempurnaan agar bisa memenuhi kebutuhan organisasi dengan demikian dapat diatasi dengan menambah kapasitas bandwidth server sehingga saat dipakai bersamaan seluruh organisasi perangkat daerah aplikasi tetap berjalan lancar, dan melakukan penyempurnaan sistem operasi aplikasi SIPKD.

4. Pengelolaan aplikasi SIPD sbagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah difokuskan pada pemanfaatan informasi yang dihasilkan berdasarkan pengelolaan data yang telah di input oleh pemerintah daerah. oleh karena itu faktor kelengkapan, keakuratan dan validitas data menjadi unsure yang penting dalam proses pengumpulan dan pengimputan elemen data yang kemudian akan diolah lebih lanjut untuk menghasilkan analisa data dalam aplikasi SIPD. Karena keberhasilan pembangunan didukung dengan adanya perencanaan dan kebijakan yang baik, efektif dan efesien didukung dengan data yang valid dan up to date. Kelemahan SIPD dan SIPKD.
5. Pemerintah daerah tidak mempunyai backup database secara realtime dan tidak mempunyai kapasitas terhadap toubleshooting terhadap SIPD dan belum terintegrasi dengan aplikasi pendukung yang ada di PEMDA Provinsi NTT Seperti Samsat Online - E Retribusi - Pengelolaan Aset.
6. Pemda Masih menggunakan teknologi framework 2.0 dan belum support terhadap perangkat lunak yang memungkinkan untuk mencari, mengakses, dan menampilkan halaman website di internet, dan harus menggunakan aplikasi yaitu ie tab.
7. Aplikasi dibiayai dan dikembangkan oleh pemerintah pusat dari kemendagri sehingga pemda tidak perlu mengeluarkan biaya dalam pembangunan aplikasi.
8. Database dan aplikasi berada di server pemda sehingga memudahkan pemda untuk memonitor dan memelihara fasilitas dengan merancang, mengatur,

menangani, dan memeriksa pekerjaan serta mampu mengatasi persoalan pada sistem perangkat lunak, jaringan, komputer, dan lain-lain secara cepat.

6.2 Saran

Adapun saran-saran yang diajukan oleh penulis antara lain sebagai berikut:

1. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Pemerintah pusat sudah meluncurkan sistem SIPD di lihat dari server masih terpusat sehingga daerah mengalami kesulitan dalam mengatur setiap database yang ada pada pemerintah provinsi NTT. Sehingga sarannya adalah perlu diotorisasi sehingga setiap Pemerintah Daerah khusus Provinsi NTT memiliki kewenangan dalam melakukan backup database APBD dari setiap periode akuntansi.

2. Badan Keuangan Daerah Bagian Akuntansi dan Pelaporan Provinsi NTT

Pemerintah Provinsi NTT perlu berkomitmen dan terus melakukan uji coba terhadap implementasi SIPD karena data yang di proses sangat banyak. Perlu meningkatkan kapasitas SDM dengan mengadakan BIMTEK atau mempunyai HELPDESK SIPD di Provinsi NTT.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanah, 2018. *Implementasi peraturan menteri dalam negeri No 8 tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) badan perencanaan dan penganggaran daerah (BAPPEDA)*, Kota Serang, Universitas Sultan Agung Tirtayasa.
- Balqis, Nadya, Fadhly, Zuhri. 2021. *Efektifitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja (DISTRANAKER) Kabupaten Aceh Barat*, Aceh: Universitas Teuku Umar.
- Dione, Frans. 2020. *Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Dalam Meningkatkan Koordinasi Pembangunan Daerah*, Jakarta: Institut Pemerintah Dalam Negeri.
- Lestarna, Gutik, Halim Abdul. 2018. *Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (studi pada Pemerintah Daerah Daerah istimewa Yogyakarta)*.
- Moleong, 2011. *Meode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. OECD 2005.
- Nasution, Muhamad, Nurwani. 2021 *Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemrintah Daerah pada BPKAD Kota Medan*, Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Putri, Reni. 2021. *Pemanfaatan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) untuk pelaksanaan koordinasi musrenbang tingkat desa di badan perencanaan dan pembangunan daerah kabupaten Deli Serdang*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018. *Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 30 ayat (1), *Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi*
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, *Tentang Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, *Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*.

- Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 4 Tahun 2021, *Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun anggaran 2020.*
- Ruhana,Faria. 2017. *Pemanfaatan sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah di Indonesia*, Jakarta: Institut Pemerintah Dalam Negeri.
- Sudianing,Ni,Septu,ketut. 2019. *Peran sistem informasi pemerintah daerah dalam menunjang peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah*, Singaraja: Universitas Panji Sakti.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 158 ayat 1, *Tentang Pemerintah Daerah.*
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, *Tentang Pemerintah Daerah Dalam Penerapan Era Otonomi Daerah.*
- Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008, *Tentang Otonomi Daerah.*
- Vira,Yusel,Husna,Asmaul. 2022. *Implementasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) dalam proses perencanaan*, Aceh Barat: Universitas Teuku Umar.